

Stigma Politik Sebagai Praktik Relasi Kuasa Dalam Novel *Namaku Alam* Karya Leila S. Chudori: Perspektif Michel Foucault

Mahju Ariadi^{1*}, M. Suryadi², Dennis Audria Pramana³

^{1,3}Magister Susastra, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

²Magister Linguistik, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

*Email: ariadimahju29@gmail.com

Abstract

*This study analyzes political stigma as a discursive practice of power in the novel *Namaku Alam* using critical discourse analysis through three stages: identification of discursive practices, analysis of power strategies, and resistance. This study uses a descriptive qualitative approach with Michel Foucault's framework of power relations to examine the narrative and dialogue within the text. The results show that political stigma functions as a mechanism of power operating through marginalization, normalization, and social surveillance, shaping the subjectivity of characters across generations. In addition, resistance is manifested in forms such as confronting state domination, investigating history, adopting economic strategies to avoid structural marginalization, and efforts to negotiate one's position within social relations. This resistance demonstrates that in every power relation, there is always resistance. These findings affirm that power is not only repressive, but also productive in shaping social identity. This enables us to understand how a critical reading of the interplay of history, ideology, and identity takes place in contemporary literature.*

Keywords: discourse, labelling, power, resistance, stigma,

Intisari

Penelitian ini menganalisis stigma politik sebagai praktik diskursif kekuasaan dalam novel *Namaku Alam* menggunakan analisis wacana kritis melalui tiga tahap: Identifikasi praktik diskursif, analisis strategi kekuasaan, dan resistensi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka teori relasi kuasa Michel Foucault untuk mengkaji narasi dan dialog dalam teks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stigma politik berfungsi sebagai mekanisme kekuasaan yang beroperasi melalui marginalisasi, normalisasi, dan pengawasan sosial, yang membentuk subjektivitas karakter lintas generasi. Selain itu, perlawanan terwujud dalam bentuk melawandominasi negara, penyelidikan sejarah, strategi ekonomi untuk menghindari marginalisasi struktural, maupun upaya untuk menegosiasikan posisinya dalam relasi sosial. Perlawanan ini menunjukkan bahwa dalam setiap relasi kekuasaan, pasti selalu ada perlawanan. Temuan ini menegaskan bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga produktif dalam membentuk identitas sosial. Hal ini membawa kita memahami bagaimana pembacaan kritis atas hubungan sejarah, ideologi, dan identitas dalam sastra kontemporer.

Kata Kunci : kekuasaan, labeling, resistensi, stigma, wacana

PENDAHULUAN

Stigma politik adalah produk sosial yang terbentuk ketika pihak berwenang yang berkuasa memberikan identitas atau label khusus kepada kelompok tertentu. Stigma adalah fenomena masyarakat yang sangat kuat, ini terkait erat dengan nilai-nilai negatif yang ditanamkan pada identitas sosial seseorang (Firawati, Yolanda, Kuswarni 2023). Hal ini menyebabkan individu dibedakan dari standar masyarakat, berujung pada interpretasi negatif, pelabelan, dan diskriminasi. Sebagaimana dijelaskan Goffman (1963), stigma adalah karakteristik atau kondisi yang dibangun secara sosial yang secara signifikan merendahkan nilai identitas sosial seseorang.

Stigma politik dalam sastra sangat penting untuk dibahas, karena melalui tulisanlah pengalaman nyata orang-orang yang tidak tercantum dalam buku sejarah dapat diceritakan kembali. Sastra berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan fakta sejarah dan sosial (Apriyani, Daulay 2024). Hal demikian juga disampaikan, Kuntowijoyo (2004:17) ia menegaskan bahwa sastra memberikan perspektif subjektif yang mendalam untuk menghidupkan kembali peristiwa sejarah yang mungkin belum terdokumentasikan secara menyeluruh. Karya sastra historis merupakan ruang diskursif yang memperlihatkan bagaimana sejarah dikonstruksi melalui bahasa dan ideologi (Supriyadi 2016). Oleh karena itu, sastra dapat dipahami sebagai arena representasi yang menunjukkan hubungan kuasa dalam konteks sosial tertentu.

Sebagai media ekspresi, sastra mencerminkan kombinasi pemikiran, gejala emosi, dan pengalaman latar belakang penulis (Antarsyach et al., 2025). Leila S. Chudori merupakan sastrawan dan jurnalis yang secara konsisten menggunakan peristiwa sejarah, konflik politik, dan trauma sosial sebagai basis narasi karyanya. seperti yang tergambar dalam karya sastranya *Pulang* (2012), *Laut Bercerita* (2017), dan *Namaku Alam* (2023). Salah satu karyanya yang menarik diulas adalah novel *Namaku Alam*, tema sentral yang diangkat dalam novel ini adalah trauma dan stigmatisasi pasca peristiwa 1965.

Novel *Namaku Alam* menceritakan kisah seorang anak dari eks-tahanan politik yang hidup di bawah beban stigma pada era Orde Baru. Melalui tokoh utamanya Alam, novel ini menggambarkan proses marginalisasi, pengawasan ketat, serta kesulitan dalam membangun identitas diri yang benar-benar bebas dari pengaruh masa lalu. Pengalaman ini menunjukkan bahwa stigma politik bukan sekadar label negatif, melainkan mekanisme sistematis yang mengendalikan interaksi sosial dan menentukan posisi seseorang dalam kehidupan di sekitarnya.

Novel ini mengeksplorasi perjuangan seorang anak yang tumbuh di bawah bayang-bayang sejarah politik orang tuanya. Melalui tokoh Alam, pembaca diajak untuk menyaksikan bagaimana identitas pribadi tidak sepenuhnya otonom, melainkan dibentuk oleh diskursus politik yang lebih luas. Stigma yang melekat pada keluarga eks-tahanan politik bukan hanya label sosial, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang membatasi pergerakan, akses sosial, dan pembentukan subjektivitas. Oleh karena itu, stigma dalam novel ini bukan sekadar masalah psikologis, melainkan praktik sistemik relasi kuasa.

Untuk memahami persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif Michel Foucault. Michel Foucault adalah salah satu tokoh paling penting dalam teori postmodern, salah satu kontribusi utamanya berkaitan dengan konsep wacana dan kekuasaan. Dalam konteks ini, Foucault memfokuskan analisisnya pada manifestasi dan implikasi hubungan kekuasaan sebagaimana yang muncul dalam teks sastra (Lulyastuti, Satriani 2025).

Foucault menegaskan bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat represif, melainkan juga memiliki dimensi produktif yang secara aktif mengonstruksi ilmu pengetahuan, standar norma, serta identitas diri seseorang (Foucault 1978:93). Menurutnya kekuasaan dapat tersebar di berbagai aspek kehidupan dan tidak hanya bersifat hierarkis atau represif (Ramadani, Satriani 2025). Kekuasaan beroperasi melalui wacana, institusi, dan norma yang berperan dalam membangun subjektivitas seseorang. Dalam kerangka ini, bahasa berfungsi sebagai alat vital dalam menghasilkan pengetahuan dan kebenaran (*power/knowledge*) yang secara persuasif mengatur perilaku individu (Foucault, 1980; Pratama, 2023). Namun, di mana kekuasaan ada, terdapat juga perlawanan. Dipertegas oleh Foucault (dalam Mudhoffir, 2013) bahwa di mana ada kekuasaan, di situ juga terdapat anti kekuasaan.

Adapun penelitian sebelumnya yang menggunakan teori relasi kuasa Michel Foucault, pertama, oleh Ratna Ayuningtyas (2019) dalam artikel "*Relasi Kuasa dalam Novel Anak Rantau Karya Ahmad Fuadi*". Hasil penelitian ratna menunjukkan bahwa relasi kuasa bekerja secara terselubung melalui manipulasi, stigmatisasi, dominasi, dan kontrol atas pemikiran serta tubuh tokoh, yang disebarkan melalui institusi sosial seperti agama, budaya, dan pendidikan. Kedua, Kusmintar Kusuma dan Sudikan (2023) dalam artikel berjudul "*Relasi Kuasa dalam Novel Gadis Kretek Karya Ratih Kumala: Analisis Wacana Kritis Michel Foucault*" Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuasaan bekerja melalui mekanisme manipulasi, kontrol, objektifikasi, dan stigmatisasi yang disalurkan lewat media politik, budaya, gender, dan lembaga sosial, serta selalu memunculkan bentuk perlawanan dari subjek yang mengalami

dominasi. Ketiga, Suhaila Yasaroh Nasution (2024) dalam artikel berjudul “*Relasi Kuasa dalam Novel Rindu Kubawa Pulang Karya S. Baya: Analisis Wacana Kritis Michel Foucault*”. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kekuasaan dan perlawanan dalam narasi tersebut terdistribusi melalui empat pilar utama: agama, budaya, ideologi politik, dan institusi.

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya telah mengkaji relasi kuasa dalam lingkup institusi sosial secara umum, namun belum mengeksplorasi stigma politik sebagai instrumen transmisi kuasa antargenerasi, khususnya di kalangan keturunan eks-tahanan politik pasca-1965. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian dalam menganalisis peran stigma politik, yang tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana reproduksi kuasa yang membentuk identitas dan subjektivitas individu dari satu generasi ke generasi berikutnya. Fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana stigma politik membentuk relasi kuasa dalam kehidupan tokoh Alam, dan bentuk resistensi tokoh Alam terhadap relasi kuasa tersebut. Penelitian ini menawarkan pembacaan kritis atas hubungan sejarah, ideologi, dan identitas dalam sastra kontemporer serta berkontribusi dalam menambah wawasan dalam penelitian sastra Indonesia khususnya mengenai implementasi teori relasi kuasa Michel Foucault pada kajian sastra Indonesia.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan kerangka Analisis Wacana Kritis (AWK) dari Michel Foucault. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang fenomena yang dialami subjek melalui deskripsi kata-kata dalam konteks alamiah (Moleong, 2010). Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya untuk mengungkap makna, struktur kekuasaan, dan mekanisme diskursif yang tersembunyi di balik bahasa, narasi, dan tindakan karakter dalam teks sastra. Analisis wacana kritis Michel Foucault digunakan untuk menganalisis teks media guna mengungkap cara realitas sosial terbentuk. Metode ini berfungsi sebagai alat analisis untuk menjelaskan bagaimana kelompok dominan memanfaatkan teks demi mencapai kepentingan atau tujuan tertentu (Nasution, 2024).

Sumber data utama penelitian ini adalah novel *Namaku Alam* karya Leila S. Chudori, sedangkan data penelitian berupa kata, frasa, kalimat, dialog, dan narasi yang mengandung representasi praktik kekuasaan, seperti stigmatisasi, marginalisasi, disiplin, pengawasan, dan resistensi. Data pendukung diperoleh dari buku dan artikel ilmiah yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan teori kekuasaan Michel Foucault. Pengumpulan data dilakukan melalui

teknik *close reading*, yaitu membaca novel secara berulang dan mendalam untuk mengidentifikasi bagian-bagian yang mengandung indikasi relasi kuasa, praktik diskursif, dan resistensi.

Proses analisis dalam penelitian ini mengadaptasi kerangka AWK Foucault: (1) Identifikasi praktik diskursif. Tahap ini menitikberatkan pada penelusuran pernyataan-pernyataan dalam teks yang membentuk "kebenaran" mengenai tokoh, kelompok, dan peristiwa. Peneliti mengidentifikasi label, kategori, dan norma yang digunakan oleh narasi, dialog, dan institusi dalam novel untuk mendefinisikan identitas tokoh Alam dan keluarganya. Fokus khusus diberikan pada cara stigma politik diproduksi dan direproduksi melalui bahasa sehingga menjadi wacana yang diterima sebagai kebenaran umum (*regime of truth*) dalam masyarakat Orde Baru. (2) Analisis strategi kekuasaan. Pada tahap ini, peneliti menganalisis mekanisme konkret kekuasaan. Analisis ini menelusuri fungsi stigma politik sebagai alat marginalisasi, pengawasan sosial, dan kontrol perilaku yang mendisiplinkan tubuh serta kesadaran tokoh. (3) Pembacaan resistensi, sesuai dengan prinsip Foucault (dalam Pratama, 2023) yang menyatakan bahwa "di mana ada kekuasaan di situ ada resistensi" bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk resistensi yang disebabkan oleh tokoh sebagai respons terhadap dominasi wacana. Pembacaan resistensi ini tidak memosisikan tokoh sebagai korban pasif, melainkan sebagai subjek yang aktif dalam merespons dan bernegosiasi dengan relasi kuasa yang membentuknya.

Hasil dari analisis tiga tahap ini kemudian disintesiskan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana stigma politik berfungsi sebagai mekanisme kekuasaan dan bagaimana tokoh menanggapi dominasi tersebut dalam novel *Namaku Alam*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tokoh Alam mengalami dinamika relasi kuasa yang tidak bersifat represif langsung, melainkan hadir dalam bentuk pengetahuan, batasan sosial, ekspektasi keluarga, dan mekanisme normalisasi. Proses-proses tersebut menghasilkan subjek anak yang belajar memahami dirinya melalui parameter yang telah didefinisikan oleh lingkungan sosialnya.

Identifikasi Praktik Diskursif

Sebagai fondasi kehidupan sosial, praktik diskursif berfungsi sebagai sarana penyebaran kekuasaan di semua tingkatan masyarakat. Kata "diskursif" sendiri merujuk pada wacana yang menyebarkan ideologi melalui mekanisme "politik tubuh" (Nasution, 2024). Dalam praktiknya, praktik diskursif tidak hanya mengekspresikan kritik dan perlawanan terhadap dominasi mereka yang berkuasa, tetapi juga berfungsi sebagai seperangkat aturan historis dan budaya yang mengatur dan menghasilkan pengetahuan. Berdasarkan teori Michel Foucault, produksi pengetahuan di balik praktik diskursif ini tidak pernah netral tetapi selalu terkait dengan hubungan kekuasaan dalam berbagai aspek.

Relasi Kuasa Melalui Stigma Politik

Stigma politik adalah produk sosial yang terbentuk ketika pihak berwenang yang berkuasa memberikan identitas atau label khusus kepada kelompok tertentu. Stigma politik dalam novel *Namaku Alam* membuktikan bahwa kuasa dapat bertahan bahkan setelah institusi formalnya runtuh. Ia hadir dalam bentuk bahasa, pandangan, dan perlakuan yang mengatur identitas generasi berikutnya.

“Aku melihat sinar mata ibu Uma. Sinar mata yang persis sama seperti Yu Kenanga setiap kali ia mengutarakan pendapatnya tentang bagaimana kami sebagai keluarga tapol (tahanan Politik) harus mampu hidup seperti meniti buih karena kapan saja mereka bisa memutuskan menyelesaikan hidup kami” (Chudori, 2023:30).

Kutipan tersebut memperjelas bagaimana relasi kuasa tidak hanya membentuk identitas sosial, tetapi juga menciptakan ketakutan dalam keluarga eks-tapol. Stigma politik tidak berhenti pada pelabelan, tetapi menjelma menjadi mekanisme pengawasan yang membuat individu terus mengatur dirinya. Ketakutan yang diwariskan antargenerasi ini merupakan bentuk *disciplinary power* yang digambarkan Foucault yaitu kuasa yang tidak terlihat tetapi sangat efektif dalam membentuk perilaku dan kesadaran. Pernyataan “meniti buih” memperjelas bagaimana wacana stigma yang melabeli tapol sebagai pengkhianat menciptakan kondisi ketidakamanan dan pengawasan diri yang ketat. Kekuasaan seperti ini tidak perlu selalu hadir dalam bentuk aparat, melainkan bekerja melalui pengetahuan bahwa nasib mereka sepenuhnya berada di tangan negara/aparat. Ini memaksa Alam untuk mengatur perilaku mereka secara ketat dan waspada. Relasi kuasa ini efektif karena ia beroperasi pada pikiran yang akhirnya mempengaruhi perilaku.

“Irwan mengucapkan sebuah kalimat dengan suara yang keras dan parau: lihat, tuh, janda penghianat negara dipanggil pak Nurdin” (Chudori, 2023:50).

Kutipan ini memperlihatkan bagaimana stigma politik diproduksi oleh masyarakat. Irwan merupakan representasi dari masyarakat yang telah menginternalisasi wacana negara menggunakan label “janda penghianat negara” sebagai bentuk kekerasan simbolik. Dalam perspektif Foucault, ini adalah contoh bagaimana kuasa negara menyebar melalui interaksi sosial masyarakat. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa stigmatisasi tidak hanya ditujukan kepada ayah Alam yang menjadi tapol, tetapi juga kepada anggota keluarga yang tidak terkait langsung dengan peristiwa politik tersebut. Label “penghianat negara” adalah inti dari wacana kekuasaan yang diproduksi oleh rezim Orde Baru. Wacana ini berfungsi untuk mengklasifikasikan dan mendefinisikan Alam dan keluarganya. Tindakan Irwan adalah praktik kuasa yang bertujuan mendiskriminasi dan menghukum melalui bahasa. Hal ini membuktikan bahwa kekuasaan beredar melalui intraksi sosial, menjadikan stigma sebagai alat untuk meminggirkan dan membatasi tokoh. Label ini memastikan bahwa pengalaman Alam tidak pernah bebas dari jaringan wacana yang membentuknya.

“Tetapi sekarang Litsus (penelitian khusus) tampaknya semakin menyebar ke masyarakat, bahkan ke anak-anak sekolah. Itu adalah langkah pertama pemerintah menuju berlakunya kebijakan untuk ‘membersihkan unsur-unsur komunisme sampai ke akar-akarnya’. Dan yang mereka anggap ‘akar’ itu adalah seluruh keturunan tapol meski kami lahir bertahun-tahun setelah tragedi 1965” (Chudori, 2023:228-229).

Kutipan ini menunjukkan bagaimana Litsus digunakan sebagai alat untuk memberikan kekuatan negara yang melampaui batas institusional. Litsus awalnya digunakan di ranah birokrasi dan militer, tetapi kemudian masuk ke ruang sosial yang paling dasar, seperti sekolah. Fakta bahwa penelitian khusus dilakukan pada anak-anak di sekolah menunjukkan bagaimana otoritas negara menormalisasi kecurigaan sebagai praktik sosial. Alam sebagai anak eks-tapol ikut terseret karena sejarah keluarganya. Menurut kerangka Foucault, ini adalah bentuk power di mana negara mengontrol populasi dengan mengkategorikan orang menurut silsilah politik. Meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam peristiwa 1965, keturunan tapol dianggap sebagai akar masalah. Oleh karena itu, kuasa beroperasi secara genealogis menghukum pelaku dan mengontrol garis keturunan mereka sebagai subjek sosial yang dianggap berbahaya.

Stigma politik dihasilkan melalui label-label seperti “anak komunis,” “janda penghianat negara,” dan “praktik Litsus” yang menormalisasi kecurigaan terhadap keturunan eks-tahanan politik. Pernyataan-pernyataan ini merupakan praktik diskursif yang secara sistematis membentuk persepsi kebenaran mengenai identitas tokoh dan keluarganya. Label tersebut menjadi bagian dari wacana stigma komunis, kekhawatiran terhadap keturunan tapol, dan keyakinan bahwa mereka mengancam stabilitas nasional, yang telah menjadi rezim kebenaran (*regime of truth*) dalam masyarakat Orde Baru. Kebenaran ini tidak dirancang untuk mencerminkan kenyataan, melainkan untuk membenarkan dan menghasilkan hubungan kekuasaan yang menguntungkan suatu rezim. Pemahaman terhadap wacana ini menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana kekuasaan secara aktif beroperasi melalui berbagai mekanisme strategi untuk mendisiplinkan, meminggirkan, dan mengendalikan individu seperti tokoh Alam dan keluarganya.

Strategi Kekuasaan

Wacana stigma yang diidentifikasi dalam pembahasan sebelumnya dioperasionalkan menjadi mekanisme kekuasaan yang konkret. Stigma tidak hanya beredar sebagai pernyataan, ia beroperasi melalui institusi, praktik sosial, dan regulasi untuk mendisiplinkan dan mengendalikan tokoh Alam.

Relasi Kuasa Melalui Marginalisasi Akses Sosial

Pengendalian akses terhadap sumber daya adalah hubungan kekuasaan yang paling menonjol. Selama Orde Baru, anggota keluarga tapol seringkali dipersulit untuk menduduki jabatan publik, mendapatkan pekerjaan, atau bahkan dalam akses pendidikan. Batasan-batasan non-fisik ini bertujuan untuk membatasi mobilitas sosial dan menjaga kelompok ini dalam posisi rentan. Dengan mengontrol akses sosial dan ekonomi, negara berhasil menormalkan keluarga Alam ke dalam status sosial terpinggirkan. Sehingga keluarga tapol ini mendapatkan kesulitan di ranah umum seperti pada kutipan berikut ketika Alam ingin mengakses pendidikan formal:

“Pada hari pertama kami di SMA Putra Nusa, kami sudah menghadapi pertanyaan abadi soal identitas kami. tak mungkin hidup di pojok Indonesia manapun tanpa di utak atik soal sejarah keluarga, tak mungkin kami bisa hidup dengan tenang dan fokus akademis saja Identitas kami sebagai anak tahanan politik akan selalu menjadi bayang-bayang hitam yang membututi kami hingga akhir hayat” (Chudori, 2023:227).

Pertanyaan identitas di hari pertama sekolah menunjukkan bahwa Alam tidak pernah diizinkan untuk menjadi siswa yang normal dalam mendapatkan pendidikan. Kutipan “bayang-bayang hitam yang membututi kami hingga akhir hayat” menggambarkan relasi kuasa yang bersifat abadi. Kuasa ini berhasil mengubah stigma politik menjadi mekanisme disiplin yang bersifat internal, kutipan tersebut memperlihatkan bahwa salah satu hasil paling nyata dari operasi kekuasaan adalah marginalisasi. Tidak hanya hukuman atau larangan yang dilakukan oleh kekuasaan, tetapi kekuasaan juga menciptakan klasifikasi sosial yang membedakan siapa yang dianggap normal dan siapa yang dianggap pinggiran. Dalam novel ini, label sebagai anak tahanan politik adalah hasil dari wacana politik Orde Baru yang menghasilkan tokoh-tokoh yang mencurigakan, diawasi, dan dinilai secara berbeda. Institusi pendidikan yang seharusnya berfungsi sebagai ruang netral justru menjadi tempat marginalisasi. Alam tidak pernah bisa fokus akademisnya saja, karena ia selalu dipaksa oleh lingkungan untuk berurusan dengan sejarahnya. Ini adalah bentuk pengawasan tanpa henti *Panopticon*, di mana ancaman stigma dari luar memaksa Alam untuk mengatur dirinya agar tidak melanggar batasan yang ditetapkan oleh masyarakat bahkan di ruang yang seharusnya netral seperti institusi pendidikan.

Relasi Kuasa Melalui Ranah Sosial

Relasi kuasa di ranah sosial adalah jaringan yang paling aktif dalam menerapkan dan menyebarkan stigma politik. Ranah sosial adalah tempat interaksi sehari-hari antara tokoh Alam dan lingkungannya. Ini adalah tempat di mana membahas tentang stigma politik yang dilabeli pada tokoh membentuk dan membatasi tokoh dalam lingkup sosialnya.

“Bukan karena aku rigid, Win, Lebih karena sejarah keluargaku saja. Sebisa mungkin, aku tak ingin berurusan dengan aparat manapun karena bakal menyusahkan banyak orang” (Chudori, 2023:329).

Pernyataan Alam “tak ingin berurusan dengan aparat manapun” bukan semata-mata sikap pribadi, melainkan hasil dari disiplin sosial yang tertanam sejak kecil. Ketakutan Alam terhadap aparat menunjukkan bagaimana ranah sosial membentuk individu yang secara sukarela membatasi dirinya demi menghindari konsekuensi sosial yang lebih besar. Dengan kata lain, kuasa negara telah bertransformasi menjadi etika sosial kehati-hatian yang diwariskan dalam interaksi sehari-hari. Pernyataan ini menunjukkan bahwa alam telah menginternalisasi kuasa disiplin. Alam menjadi rigid (kaku/berhati-hati) karena stigma politik dan kekuatan sosial. Efek *Panopticon* yang kuat bahwa alam mampu mengontrol perilakunya

sendiri, atau *self-regulation*, dan secara sadar menghindari aktivitas publik yang dapat menarik perhatian pihak berwenang. Keengganannya berurusan dengan aparat bukan karena takut dihukum, tetapi karena ia tahu itu bakal menyusahkan banyak orang ini menunjukkan bahwa alam bertanggung jawab secara emosional atas posisi marjinal keluarganya.

“Tommy tampak masih penasaran karena tidak berhasil menyakiti apalagi menghinaku, sampai akhirnya: ‘Ari, biarin dia pulang. Kamu ngapain mengundang anak komunis kerumah ini. Bikin kotor!’ (Chudori, 2023:417).

Kutipan tersebut menunjukkan bagaimana stigma politik tersebar di ranah sosial, terutama pergaulan antar individu. Bahasa berfungsi sebagai alat kuasa, seperti yang ditunjukkan oleh istilah “anak komunis” dan “bikin kotor”. Dalam perspektif analisis wacana Foucault, bahasa tidak netral ia memproduksi dan mempertahankan kebenaran sosial tertentu. Label anak komunis tidak hanya menghina, tetapi juga menegaskan posisi tokoh Alam adalah subjek yang tidak pantas ditempatkan di lingkungan sosial tertentu. Dalam kasus ini, ranah sosial berfungsi sebagai perpanjangan tangan kekuasaan negara.

Relasi Kuasa Melalui Normalisasi Perilaku

Relasi kuasa yang beroperasi melalui normalisasi perilaku adalah mekanisme yang menetapkan standar ideal dan mendisiplinkan individu agar sesuai dengan norma-norma tersebut. Pada tokoh Alam, normalisasi ini hadir melalui pendidikan berorientasi budaya di keluarga dan keharusan untuk menghindari pusat perhatian di masyarakat yang penuh stigma.

“Aku tak berminat sama sekali untuk ikut cerdas tangkas, cepat tepat, atau program apapun yang pasti memaksa orang menjadi pusat perhatian. Menjadi perhatian satu sekolah saja sudah cukup berbahaya, apalagi satu Jakarta.” (Chudori, 2023:250).

Kutipan ini menunjukkan normalisasi, yaitu normalisasi sebagai mekanisme bertahan hidup. Dalam keluarga eks-tapol, menjadi terlalu menonjol dianggap berbahaya karena dapat menarik perhatian aparat atau masyarakat yang masih membawa stigma politik Orde Baru. Dengan kata lain, perilaku untuk tidak menjadi pusat perhatian menjadi standar keselamatan yang diturunkan keluarga kepada Alam. Keluarga menanamkan bahwa keselamatan terletak pada kerahasiaan dan kehati-hatian. Maka, Alam memandang program sekolah yang menempatkan siswa di depan publik sebagai ancaman. Ini menunjukkan bagaimana normalisasi bekerja bukan untuk mendisiplinkan perilaku sosial semata, tetapi untuk memastikan keberlangsungan hidup dalam konteks stigma politik.

“MESKI aku sudah menyampaikan alasanmu menonjok Irwan, Ibu tetap masih menyimpan kemarahan. Ia tak lagi bisa menyembunyikan rasa sedih dan kecewa yang mendalam sejak kami masih kecil, Ibu selalu menanamkan betul bahwa di keluarga ini tidak ada toleransi terhadap kekerasan.” (Chudori, 2023:50).

Kutipan ini memperlihatkan bagaimana keluarga Alam menjadi salah satu ruang utama beroperasinya relasi kuasa dalam bentuk disiplin, sebagaimana dijelaskan Foucault dalam *Discipline and Punish*. Dalam konsep Foucault, disiplin bukan sekadar hukuman fisik, tetapi mekanisme pembentukan perilaku, pengaturan tubuh, dan internalisasi norma (Foucault 1977). Dalam kutipan tersebut, ibu Alam menekankan bahwa “tidak ada toleransi terhadap kekerasan di dalam keluarga” pernyataan ini merupakan bentuk normalisasi perilaku yang berfungsi untuk membentuk perilaku anak melalui aturan moral yang ditegakkan secara konsisten. Ibu Alam tidak hanya menyatakan larangan, tetapi telah menanamkannya sejak kecil, menunjukkan bahwa pendidikan moral di rumah adalah proses jangka panjang yang bertujuan membentuk Alam dengan perilaku tertentu.

Meskipun Alam sudah memberikan alasan atas tindakannya memukul Irwan yang notabene terkait dengan penghinaan dan stigma politik terhadap keluarganya ibunya tetap marah. Ini menunjukkan bahwa disiplin dalam keluarga berfungsi untuk mengatur *respons internal* anak, bukan hanya tindakan lahiriah. Relasi kuasa disiplin yang dimaksud Foucault bukanlah sekadar melarang atau menghukum, tetapi membentuk *self-regulation* kemampuan anak untuk mengendalikan impulsnya agar sesuai dengan norma keluarga. Ketegasan ibu dalam kutipan ini memperlihatkan bagaimana anak diarahkan untuk menginternalisasi nilai non-kekerasan, meskipun tindakan kekerasan terjadi sebagai respons terhadap provokasi atau ketidakadilan.

Resistensi

Foucault berpendapat bahwa perlawanan *resistance* tidak berada di luar relasi kuasa, melainkan selalu muncul berdampingan dengan praktik kekuasaan (Foucault 1978). Dengan kata lain, bila ada satu hubungan relasi kuasa di ranah tertentu maka disitulah kekuasaan sedang berjalan, dan akan selalu ada yang menentang kekuasaan tersebut. Resistensi menunjukkan sikap bertahan, berusaha melawan, atau upaya oposisi terhadap kuasa yang bekerja (Ramadani, Satriani, 2025).

Dalam kerangka pemikiran Foucault resistensi tidak harus berupa tindakan besar, resistensi dapat muncul melalui upaya subjek, menantang kebenaran resmi, dan menafsirkan

ulang dirinya dalam relasi kuasa yang membentuknya. Dalam novel *Namaku Alam*, pencarian jati diri tokoh Alam melalui penelusuran sejarah keluarga dan bangsa merupakan bentuk resistensi diskursif yang sangat signifikan. kutipan berikut memperlihatkan bagaimana Alam berusaha melawan dominasi wacana negara.

“Karena aku ingin mempelajari segala yang compang camping di negeri ini; karena aku ingin belajar tentang identitas kita, karena itu aku perlu menyusuri sejarah Indonesia.”
(Chudori, 2023:232).

Kutipan ini merepresentasikan dorongan internal Alam untuk menggali sejarah bangsanya sebagai langkah memahami identitas pribadinya. Dalam konsep Foucault, kuasa negara bekerja melalui mekanisme *regimes of truth* kebenaran yang diproduksi oleh institusi formal dan diterima secara luas oleh masyarakat. Sejarah Orde Baru, telah dibentuk sebagai kebenaran tunggal yang menghapus suara korban dan menyembunyikan fakta. Keputusan Alam menyusuri sejarah Indonesia merupakan tindakan menolak kebenaran tunggal tersebut. Ia ingin memahami segala yang “compang-camping” sebuah metafora yang merujuk pada sejarah bangsa yang penuh celah, ketidakkonsistenan, dan manipulasi politik. Dengan menyelidiki sejarah secara kritis, Alam melakukan resistensi terhadap kuasa yang membatasi pengetahuannya dan identitasnya sebagai anak eks tapol. Ini adalah bentuk resistensi perjuangan melawan dominasi pengetahuan yang telah menyingkirkan tokoh seperti dirinya.

“Kita tak pernah bisa belajar dengan lebih dalam tentang apa yang terjadi pada tragedi 1965; tak pernah ada catatan peristiwa berdarah 1965-1966 dimana ratusan ribu, bahkan jutaan, orang tewas atau hilang hanya karena mereka dianggap terlibat atau keluarga PKI. Menurut saya, tahun 1965 telah mengubah identitas kita sebagai bangsa Indonesia, dan itu juga tak pernah kita diskusikan di dalam sejarah sama sekali. Jadi kalau peristiwa 1965 saja kita peroleh versi pemerintah, bagaimana kita juga tahu apa yang terjadi dengan peristiwa Malari? (Chudori, 2023:246).

Kutipan ini memperlihatkan kesadaran kritis Alam terhadap ketidakhadiran sejarah yang sebenarnya. Alam menyadari bahwa narasi resmi negara tidak memberi ruang bagi pengalaman korban, termasuk keluarganya sendiri. Peristiwa seperti tragedi 1965 dan Malari direduksi menjadi catatan sepihak yang melanggengkan stigma politik. Kesadaran ini merupakan bentuk resistensi intelektual yang kuat. Dalam pandangan Foucault, upaya mempertanyakan narasi resmi dan mencari apa yang disembunyikan merupakan bentuk penting dari *counter-discourse* wacana tandingan yang berfungsi melawan kuasa dominan. Sejarah yang ada terasa seperti banyak kekosongan, Alam merasakan sebagai korban bagaimana kuasa bekerja melalui penghapusan memori kolektif. Alam merupakan hasil dari strategi negara untuk mengontrol

identitas nasional dan menghapus sejarah kekerasan. Resistensi Alam muncul melalui keinginan untuk mengisi kekosongan itu dengan pengalaman keluarga dan narasi-narasi yang tak pernah dicatat oleh sejarah resmi.

Selama Orde Baru, eks tapol dan keturunannya seringkali dilarang atau dibatasi. Pembatasan ini adalah bentuk kuasa yang bekerja dengan mengontrol akses ekonomi, negara berhasil menormalkan keluarga Alam ke dalam status sosial terpinggirkan. Stigma yang didapatkan keluarga Alam menciptakan wacana risiko di masyarakat. Dalam pandangan masyarakat atau birokrat, keluarga eks tapol dianggap tidak dapat dipercaya atau berbahaya secara politik. Wacana ini menyebabkan diskriminasi ekonomi dimana keluarga Alam mungkin sulit mendapatkan pekerjaan untuk kelangsungan hidup karena pembatasan yang diterapkan kepada keluarga eks-tapol ini. Keterbatasan akses ekonomi mendorong keluarga Alam untuk mencari alternatif ekonomi yang juga menjadi bentuk resistensi terhadap sistem kuasa yang membatasi jalur ekonomi formal. Ini adalah upaya untuk membangun kemandirian yang tidak bergantung pada belas kasihan kuasa negara. Seperti pada kutipan berikut:

“Ibuku seorang orangtua tunggal, mencari nafkah dengan menerima jahitan dan memberi les privat bahasa Inggris kepada tetangga” (Chudori, 2023:31).

Kutipan ini menunjukkan stigmatisasi politik yang lebih kuat terhadap anggota keluarga eks-tapol. Bukan karena tidak memiliki kemampuan, tetapi karena sejarah politik keluarga menghalangi akses ke pekerjaan formal. Menerima jahitan dan memberi les privat adalah bentuk resistensi ekonomi yang halus tetapi penting. Ibu Alam memilih untuk tidak bergantung pada sistem birokrasi negara yang menstigmanya, di tengah struktur kekuasaan yang berusaha meminggirkan mereka. Ibu Alam menciptakan zona ekonomi dengan menjadi wiraswasta di rumah. Pengetahuan bahasa Inggris dan keterampilan menjahit digunakan sebagai alat untuk merebut kembali kedaulatan hidup yang coba dirampas oleh negara. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak pernah sempurna, tokoh selalu menemukan celah untuk keluar dari kendali negara.

“Nggak ngambek, hanya realistis! Aku bisa mengajar karate, sudah bisa menyaingi gaji Yu Kenanga kok” (Chudori, 2023:230).

Kutipan ini menunjukkan bahwa Alam tidak memosisikan diri sebagai subjek pasif dari kondisi ekonomi keluarganya. Ia berupaya berkontribusi secara mandiri melalui keterampilan yang dimilikinya. Tindakan Alam ini mencerminkan proses pembentukan tokoh yang tidak sepenuhnya ditentukan oleh struktur kuasa. Alam menggunakan tubuh dan keahliannya sebagai

modal untuk menegosiasikan posisi ekonominya, sekaligus menolak ketergantungan penuh pada sistem yang telah meminggirkannya. Resistensi Alam bersifat pragmatis dan mandiri, dengan mencari jalur pendapatan non-formal yang tidak memerlukan interaksi langsung dengan birokrasi maupun aparat, Alam secara aktif meruntuhkan upaya marginalisasi yang ingin menjadikannya warga negara yang tak berdaya secara finansial.

KESIMPULAN

Penelitian ini, melalui kerangka Analisis Wacana Kritis, mengungkapkan bagaimana stigma politik terhadap keluarga eks-tahanan politik dalam novel *Namaku Alam* berfungsi sebagai praktik diskursif yang sistematis. Label-label seperti "anak komunis," "janda penghianat negara," dan praktik penelitian khusus (Litsus) adalah pernyataan-pernyataan yang tidak sekadar mendeskripsikan realitas, tetapi secara aktif membentuk dan mereproduksi suatu *regime of truth* di masyarakat Orde Baru. Pada hasil analisis dapat dijelaskan bahwa stigma politik sebagai dinamika kekuasaan yang kompleks dalam kehidupan tokoh Alam. Stigma terhadap keluarga eks-tapol berfungsi sebagai label sosial juga sebagai mekanisme kekuasaan yang bekerja secara sistematis melalui marginalisasi, pengawasan sosial, dan normalisasi perilaku yang mengganggu kehidupan keluarga eks-tapol. Hubungan kekuasaan ini bersifat produktif membentuk subjektivitas para tokoh melalui internalisasi rasa takut, pembatasan akses sosial, dan regulasi perilaku di berbagai ranah kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, lingkungan sosial, dan keluarga.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya hadir dalam bentuk-bentuk represif, tetapi juga tertanam dalam praktik-praktik sosial sehari-hari yang direproduksi oleh masyarakat. Stigma politik pasca-1965 terbukti tidak berakhir pada generasi pertama, melainkan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang membentuk identitas dan pengalaman hidup para tokoh. Namun demikian, tokoh utama tidak sepenuhnya tunduk pada relasi kekuasaan ini. Berbagai bentuk perlawanan muncul sebagai respons terhadap dominasi yang dialami, baik melalui perlawanan atas dominasi negara, melalui penyelidikan sejarah, strategi ekonomi alternatif untuk menghindari marginalisasi struktural, maupun upaya untuk menegosiasikan posisinya dalam relasi sosial. Perlawanan ini menegaskan bahwa dalam setiap relasi kekuasaan, pasti ada perlawanan.

Resistensi tidak harus spektakuler atau diselenggarakan secara besar-besaran untuk memiliki makna, resistensi dapat ditemukan dalam taktik-taktik kecil dan upaya-upaya pribadi

untuk bertahan serta menegosiasikan identitas. Sastra berfungsi sebagai media penting untuk menelusuri dinamika kekuasaan yang tidak terlihat dalam dokumen historis atau data statistik. Melalui sastra, kita dapat mengakses pengalaman internal, ambivalensi emosional, dan proses pembentukan subjektivitas yang kompleks. Implikasinya adalah bahwa studi sastra dengan pendekatan Foucauldian memberikan kontribusi signifikan bagi pemahaman sejarah Indonesia kontemporer, terutama dalam hal bagaimana warisan Orde Baru terus mempengaruhi hubungan sosial generasi penerus.

DAFTAR PUSTAKA

- Antarsyach, Anelka A., Widyastuti Purbani, Ari Nurhayati, & Isti Haryati. 2025. "Keberdayaan Perempuan terhadap Penindasan dalam Novel Perempuan di Titik Nol Karya Nawal El-Saadawi." *Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra* 20 (1): 15-29. <https://doi.org/10.14710/nusa.20.1.15-29>
- Apriyani, Trisanti, & Resneri Daulay. 2024. "Refleksi Sejarah Orde Baru Pada Novel *Namaku Alam*." *Lingua Susastra* 4 (2): 183–93. <https://doi.org/10.24036/ls.v4i2.224>.
- Ayuningtiyas, Ratna. 2019. "Relasi Kuasa Dalam Novel Anak Rantau Karya Ahmad Fuadi : Kajian Teori Michel Foucault." *Sarasvati* 1 (1): 73–86. <https://doi.org/10.30742/sv.v1i1.657>.
- Chudori, L. S. 2023. *Namaku Alam*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Firawati, Ade Yolanda, & Prasuri Kuswarini. 2023. "Melawan Stigma Inferioritas Dalam Novel Gadis Pantai Karya Pramoedya Ananta Toer". *Jurnal Ilmiah Hospitality* 12 (1), 47-60. <https://doi.org/10.47492/jih.v12i1.2632>.
- Foucault, M. 1977. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Pantheon Books.
- Foucault, M. 1978. *The History of Sexuality, Volume I: An Introduction*. New York: Pantheon.
- Goffman, E. 1963. *Stigma: Notes on the management of spoiled identity*. Prentice-Hall.
- Kuntowijoyo. 2004. "Sejarah / Sastra." *Humaniora* 16 (1): 17–26. <https://doi.org/10.22146/jh.v16i1.803>.
- Kusuma, SSK, & Sudikan, SY. 2023. "Relasi Kuasa Dalam Novel Gadis Kretek Karya Ratih Kumala: Analisis Wacana Kritis Michel Foucault". *Jurnal Sapala* , 10 (3): 24–34. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-sapala/article/view/56512>
- Lulyastuti, dan Irma Satriani. 2025. "Relasi Kuasa Dalam Novel Anjing Mengeong, Kucing Menggonggong Karya Eka Kurniawan: Perspektif Michael Foucault". *DIDAKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 3 (1): 1-8. <https://doi.org/10.33096/didaktis.v3i1.789>
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mudhoffir, A. M. 2013. "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik". *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, Volume 18 (1): 117–133. <https://doi.org/10.7454/mjs.v18i1.3734>

- Nasution, S. Y. 2024. “Relasi Kuasa dalam Novel Rindu Kubawa Pulang Karya S. Baya: Analisis Wacana Kritis Michel Foucault”. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 3(1): 196–216.
- Pratama Andika Refaldi. 2021. “Kekuasaan, Pengetahuan, Dan Hegemoni Bahasa Dalam Perspektif Foucault Dan Francis Bacon.” *Jurnal Filsafat Indonesia* 4 (1): 34–37. <https://doi.org/10.23887/jfi.v4i1.30543>
- Ramadani, Atika Suri, dan Irma Satriani. 2025. “Relasi Kuasa Dan Wacana Resistensi Dalam Novel Janji Karya Tere Liye Perspektif Michel Foucault”. *DIDAKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 3 (2): 67-76. <https://doi.org/10.33096/didaktis.v3i2.919>
- Supriyadi. 2016. Posmodernisme Linda Hutcheon: Poetics Of Postmodernism (1989) And Politic Of Postmodernism (2002). *Jurnal Poetika* Vol. 4(2): 74–84. <https://doi.org/10.22146/poetika.v4i2.17532>